

MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS MASYARAKAT DAN SEKOLAH

Sodiah

Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'izhah Merlung Jambi, Indonesia
sodiah396@gmail.com

Abstrak

Progres lembaga pendidikan Islam memerlukan sebuah sistem yang terbuka dari superior ke subordinat. Birokrasi yang panjang yang harus dilalui dalam implementasi pendidikan mengakibatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian yang kecil. Untuk meningkatkan manajemen lembaga pendidikan islam diterapkan manajemen berbasis masyarakat dan manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis masyarakat memberikan peluang yang besar untuk pembelajaran masyarakat dan juga secara umum dapat digunakan untuk membentuk tujuan pendidikan islam dan kebijakan pendidikan yang bermanfaat. Oleh karena itu, manajemen berbasis sekolah merupakan hasil dari hukum otonom demikian sehingga pengelola memiliki otoritas untuk mengatur sumberdaya manusia dan untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan islam.

Kata Kunci: manajemen, masyarakat, pendidikan Islam

Abstract

The institutional Islamic education progress need an open system from superior to subordinate. The longer bureaucracy has to be passed in an education implementation cause the smaller effectiveness and efficiency achievement. Therefore in improving institutional Islamic education management is applied society based management and school based management. The society based management gives large chance for learning community also its general to form Islamic education purpose and education policy that multi-benefit. Thus school based management as a result from the autonomy law so that managers have authority to manage sources and human resources for achieving the objective of institutional Islamic education.

Keywords: management, society, islamic education

PENDAHULUAN

Kebijakan reformasi telah mengubah sistem pendidikan yang sentralisasi menjadi desentralisasi. Hal ini berdampak pada semakin terbukanya kebebasan yang dimiliki masyarakat untuk merancang dan melaksanakan pendidikan sesuai kebutuhan sendiri. Akibatnya, upaya-upaya menyelenggarakan manajemen pendidikan berbasis masyarakat (*society based management*) dan manajemen berbasis sekolah (*school-based management*) dewasa ini menjadi sebuah kebutuhan di tengah era desentralisasi.

Manajemen pendidikan berbasis masyarakat secara konseptual, merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”. Sedangkan Manajemen Berbasis Sekolah adalah paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah

(pelibatan masyarakat) dalam rangka kebijakan pendidikan nasional. Kedua konsep ini sangat membantu lembaga pendidikan untuk melaksanakan pengembangan baik kuantitas maupun kualitas.

Lembaga pendidikan Islam sebagai sebuah lembaga yang menyelenggarakan proses pendidikan umum juga agama juga memiliki kesempatan yang sama dengan lembaga pendidikan umum untuk melaksanakan manajemen secara mandiri. Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan kuantitas lembaga pendidikan Islam. Sebagaimana peningkatan kuantitas lembaga ini, maka diharapkan terjadi peningkatan kualitas proses pendidikan yang diselenggarakan.

Pendidikan Islam memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “men-cerdaskan kehidupan bangsa”, maka melalui lembaga pendidikan Islam tujuan yang ingin dicapai yaitu

mencerdaskan pengetahuan anak bangsa, membina akhlak anak didik, dan membangun jiwa kemandirian. Pada awalnya lembaga pendidikan Islam yang dikenal hanyalah pesantren kemudian berkembang menjadi madrasah dan dengan adanya modernisasi muncullah sekolah Islam terpadu.

Berkembangnya lembaga pendidikan Islam seiring dengan semakin kompleks kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan. Perkembangan ini menuntut kemudahan pengelolaan sistem pendidikan sehingga tepat sasaran. Dengan adanya manajemen berbasis masyarakat dan manajemen berbasis sekolah maka strategi pengelolaan lembaga pendidikan Islam semakin bervariasi dan menunjukkan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam tulisan ini, sebagai berikut: 1). Bagaimanakah manajemen dalam Islam? 2). Bagaimanakah konsep manajemen pendidikan? 3). Bagaimanakah hakikat masyarakat dan sekolah? 4). Bagaimanakah implementasi manajemen berbasis masyarakat? 5). Bagaimanakah implementasi manajemen berbasis sekolah?

PEMBAHASAN

Manajemen dalam Islam

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik dan tidak boleh dilakukan secara asal-asalan (Hafifuddin dan Tanjung, 2003, p. 1). Arti pentingnya manajemen bagi umat muslim sebagaimana Imam Al Fakh Al Razi dalam Veithzal mengatakan bahwa hidup adalah nikmat pertama yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada manusia sebelum nikmat lainnya termasuk nikmat iman karena tanpa kehidupan nikmat lain tak bisa diperoleh. Karena itulah maka nikmat hidup harus disyukuri dengan memberdayakannya dan dikelola secara baik sehingga memiliki makna dan nilai positif semaksimal mungkin (Zainal, 2013, p.135).

Pengertian yang sama dengan hakikat manajemen adalah al tadbir (pengaturan) kata ini derivasi dari kata dabbara (mengatur) (Ramayulis, 2010, p.261). Dalam Al-Qur'an:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu. (Q.S. As-Sajadah:5)

Dalam ayat di atas terdapat kata (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ) yang berarti mengatur urusan. Di dalam Imron Fauzi, Ahmad Al Syawi menafsirkan bahwa Allah pengatur alam. Keteraturan alam raya merupakan bukti kebesaran Allah dalam mengelola alam. Namun karena manusia diciptakan Allah telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya (Fauzi, 2012, p.69).

Manajemen Pendidikan

Manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya (Rohman dan Amri, 2012, 11).

Secara universal manajemen adalah penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran dan kinerja yang tinggi dalam berbagai tipe organisasi profit maupun nonprofit (Zainal et. al., 2013, p.134). Manajemen merupakan koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, sehingga manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan (Zainal et. al., 2013, pp.134-135). Gambaran proses manajemen dapat dilihat dalam Samsuddin (2010:16)

Jadi, manajemen pendidikan pada dasarnya adalah upaya mengatur segala sesuatu baik sumber daya maupun sumber daya manusia untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dalam mengatur ini kemudian timbul beberapa masalah. Siapa yang mengatur, mengapa harus diatur, dan apa tujuan dari pengaturan tersebut. Sehingga manajemen membentuk suatu sistem

yang terintegrasi dari beberapa unsur lembaga pendidikan yang mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif.

Di dalam proses manajerial terdapat fungsi-fungsi manajemen, terutama adanya proses kepemimpinan. Untuk mencapai tujuan organisasi terdapat beberapa unsur mendasar, yaitu:

- a. Organisasi sebagai wadah utama adanya manajemen
- b. Manajer yang memimpin dan memikul tanggung jawab penuh dalam organisasi
- c. Aturan main dalam organisasi yang disebut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
- d. Tujuan organisasi yang ditetapkan sebelumnya
- e. Perencanaan yang di dalamnya mengandung berbagai program yang akan dilaksanakan
- f. Pengarahan, yang memberikan jalan pada sumber daya manusia yang ada
- g. Teknik-teknik dan mekanisme pelaksanaan kegiatan organisasi
- h. Pengawasan terhadap semua aktivitas organisasi agar tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan
- i. Sarana dan prasarana yang mengandung pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan perencanaan
- j. Penempatan personalitas sesuai dengan keahlian atau profesionalitas pekerjaan masing-masing
- k. Evaluasi terhadap semua kegiatan yang telah dilakukan
- l. Pertanggungjawaban akhir dari semua aktivitas yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewajiban personal organisasi (Hikmat, 2009, pp.13-14)

Implementasi manajemen terhadap pengelolaan lembaga pendidikan haruslah berorientasi pada efektivitas terhadap segala aspek atau komponen pendidikan baik dalam pertumbuhan dan perkembangan. Lembaga pendidikan memiliki komponen-komponen terikat satu sama lain yang menentukan keberhasilan lembaga tersebut, jika kepala sekolah dapat menjalankan fungsinya secara efektif dalam proses *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*.

Keberhasilan manajemen lembaga pendidikan tidak terlepas dari peran pemimpin yang memiliki integritas dan kredibilitas tinggi. Seba-

gaimana manajemen proyek yang efektif membutuhkan manajer dengan karakteristik:

- a. *Knowledge*. This refers to what the project manager knows about project management
- b. *Performance*. This refers to what the project manager is able to do or accomplish while applying their project management knowledge
- c. *Personal*. This refers to how the project manager behaves when performing the project or related activity. Personal effectiveness encompasses attitudes, core personality characteristic and leadership, the ability to guide the project team while achieving project objectives and balancing the project constraints. (Project Management Institute, 2008, p.13)

Dari pendapat di atas dipahami bahwa seorang manajer yang berhasil memimpin lembaga harus memiliki pengetahuan, kinerja, dan kepribadian. Pengetahuan ini menunjuk kepada apakah manajer mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan manajemen. Kinerja menunjuk kepada apa yang manajer bisa lakukan ketika menerapkan pengetahuan manajemennya. Kepribadian berkenaan dengan bagaimana manajer bertindak ketika memainkan proyek dan menghubungkan aktivitasnya. Efektivitas kepribadian mencakup sikap, inti karakter kepribadian dan kepemimpinan. Kemampuan ini untuk membimbing tim untuk mencapai sasaran dan menyeimbangkan semua kegiatan di dalam lembaga.

Maka manajemen lembaga pendidikan adalah suatu kegiatan mengelola unsur-unsur lembaga pendidikan secara bersama-sama yang terdiri dari tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, kesiswaan dan pembiayaan, yang dimulai dari input, process, sampai output oleh pemimpin dan anggotanya melalui proses perencanaan, penugasan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Masyarakat dan Sekolah

Beberapa pandangan filosofis tentang hakikat sekolah itu sendiri dan hakikat masyarakat, dan bagaimana hubungan antara keduanya, sebagai berikut:

- a. Sekolah adalah bagian yang integral dari masyarakat, dan bukan merupakan lembaga yang terpisah dari masyarakat
- b. Hak hidup dan kelangsungan hidup sekolah bergantung pada masyarakat.

- c. Sekolah adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan.
- d. Kemajuan sekolah dan kemajuan masyarakat saling berkorelasi dan keduanya saling membutuhkan
- e. Masyarakat adalah pemilik sekolah, sekolah ada karena masyarakat memerlukannya. (Wahjosumidjo, 2008, p.331)

Berdasarkan dimensi kepentingan masyarakat, tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah:

- a. Memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b. Memperoleh masukan dari sekolah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat
- c. Menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat
- d. Memperoleh kembali anggota masyarakat yang terampil dan makin meningkatkan kemampuannya. (Mulyasa, 2011, p.148)

Masyarakat yang berhubungan baik dengan lembaga pendidikan akan memberikan manfaat. Masyarakat/orang tua murid dan stakeholders lainnya akan mengerti dengan jelas tentang visi, misi, tujuan dan program kerja sekolah, kemajuan sekolah beserta masalah-masalah yang dihadapi sekolah secara lengkap, jelas dan akurat. Sehingga mereka dapat berpartisipasi untuk membantu sekolah secara tepat.

Partisipasi aktif masyarakat juga menguntungkan pihak sekolah. Sekolah akan mengenal secara mendalam latar belakang, keinginan dan harapan-harapan masyarakat terhadap sekolah. Pengenalan harapan masyarakat dan orang tua murid terhadap sekolah, khususnya sekolah merupakan unsur penting guna menumbuhkan dukungan yang kuat dari masyarakat.

Suatu masyarakat disebut *community* menurut Hartono yang dikutip oleh Mukhtar bilamana memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Berisi kelompok manusia
- b. Menempati suatu wilayah geografis
- c. Mengenal pembagian kerja kedalam spesialisasi dengan fungsi-fungsi yang saling ketergantungan.
- d. Memiliki kebudayaan dan sistem sosial bersama yang menganut kegiatan mereka

- e. Para warganya sadar akan kesatuan dan kewargaan mereka dalam *community*.
- f. Mampu berbuat secara kolektif menurut cara tertentu. (Mukhtar dan Iskandar, 2009, p.198)

Peran serta masyarakat, antara lain dapat berupa keterlibatannya dalam pengambilan keputusan, pendelegasian kewenangan, keterlibatan pengiriman jasa, konsultasi masalah sekolah, kehadiran ke sekolah, sumbangan dan pelayanan. Model peran serta masyarakat ini agar tidak terjadi intervensi yang berlebihan, maka haruslah disusun lebih dahulu mekanisme yang disepakati oleh sekolah dengan masyarakat. Karena bagaimanapun juga tentu ada batasan-batasan yang diperlukan agar kinerja sekolah dapat lebih optimal.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat diterapkan pada berbagai aspek lembaga pendidikan yaitu:

- a. Finansial: mengenai (urusan) keuangan, dalam bentuk ini masyarakat disamping sumber keuangannya berasal dari pemerintah namun yang lebih diharapkan adalah swadaya masyarakat itu sendiri untuk memajukan proses belajar yang di kelola, dari masyarakat untuk masyarakat, sehingga tujuan masyarakat belajar dapat dilaksanakan sesuai yang diinginkan, baik dalam bidang pembangunan fisik ataupun mental.
- b. Proteksi: Dalam KBBI merupakan perlindungan (di perdagangan, industri dsb), perlunya masyarakat belajar tidak bisa terlepas dari harus adanya perlindungan baik hukum maupun proses pelaksanaannya, hasil produk juga harus dapat bersaing dan memenuhi kebutuhan yang diharapkan.
- c. Moral: adalah masyarakat yang mampu membedakan tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, ke-wajiban, akhlak, budi pekerti, dsb.
- d. Akademis: Bentuk partisipasi ini yang bersifat ilmu pengetahuan, yang dapat disumbangkan oleh masyarakat pelaksanaan dari proses belajar dan tujuan yang diinginkan, sehingga sekolah yang diharapkan oleh masyarakat dapat bermutu.
- e. Sumber Belajar: adalah orang yang dapat dijadikan tempat bertanya tentang berbagai pengetahuan, dalam hal ini bersumber dari

masyarakat setempat dimana sekolah atau pendidikan dilaksanakan.

- f. IT (ilmu teknologi): Untuk memenuhi tuntutan zaman IT harus dapat menjadi partisipasi dalam membentuk masyarakat belajar, karena dengan IT akan terlihat kemampuan pelaksanaan kegiatan sekolah masyarakat, meskipun kemampuan dibidang IT belum dapat sepenuhnya dilaksanakan, namun meskipun dalam skala kecil IT dapat membantu melancarkan program kerja yang direncanakan masyarakat belajar.
- g. Kelembagaan, menejerial, kepe-mimpinan yaitu yang bersifat lembaga yang dipimpin seorang menejer, dengan tugas untuk membentuk program kerja masyarakat belajar yang diinginkan. (hermawan, et.al., 2008, p205)

Dalam rangka menggalang part-isipasi masyarakat, sekolah dapat mengembangkan berbagai program sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan kemasya-rakatan, seperti bakti sosial untuk kebersihan lingkungan dan membantu lalu lintas di sekitar sekolah.
- b. Mengadakan open house yang member kesempatan kepada ma-syarakat untuk mengetahui ber-bagai program dan kegiatan sekolah.
- c. Mengembangkan buletin, majalah dan lembar informasi secara berkala.
- d. Menghadirkan tokoh masyarakat untuk menjadi narasumber, pem-bicara atau pembina suatu program sekolah.
- e. Membuat program kerjasama sekolah dengan masyarakat. (Mulyasa, 2013, pp.142-143)

Penyusunan dan pelaksanaan berbagai program di atas, harus senantiasa melibatkan tokoh masya-rakat, sehingga mereka dapat mem-promosikan lebih lanjut kepada masyarakat luas. Secara operasional, kepala sekolah dapat menggalang partisipasi masyarakat melalui dewan pendidikan, komite sekolah, rapat bersama, konsultasi, radio dan televisi, surat dan telepon, pameran sekolah dan ceramah.

Keterlibatan orang tua dan masyarakat memiliki indikator sebagai berikut:

- a. Sekolah senantiasa menjalin komu-nikasi yang harmonis dengan orang tua, dan berusaha melibatkan mereka dalam pelaksanaan program sekolah.

- b. Masyarakat memiliki kesempatan untuk mengunjungi sekolah guna mengobservasi program pendidikan dan pembelajaran.
- c. Masyarakat dilibatkan dalam pembuatan keputusan-keputusan sekolah
- d. Sebagian besar orang tua me-mahami dan ikut mempromosikan program pembelajaran di sekolah.
- e. Masyarakat melalui komite aktif melaksanakan peran dan fungsi sesuai aturan

It wasn't difficult to organize community participation. For example, among the concerned citizens who regularly attended were members of the local clergy who cared deeply about minority participation. Conduct monthly coordination and implementation meetings at the superintendent's office with all the players in the room at the same time. (Lytle, 2010, p.115)

Untuk mengelola partisipasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam bukanlah hal yang sulit. Sebagai contohnya diantara masyarakat yang secara teratur menjadi anggota aktif bagi lembaga, sekolah, yang memperhatikan secara mendalam program-program sekolah. Keberhasilan mengelola partisipasi masyarakat juga dapat dilakukan dengan melaksanakan pertemuan dan koordinasi setiap bulan pada semua level lembaga pendidikan Islam dengan semua anggota tiap-tiap bidang pada waktu yang sama.

Manajemen Berbasis Masyarakat

Konsep dan Implementasi Mana-jemen Berbasis Masyarakat

Masyarakat dapat dikelompok-kan menjadi tiga, yaitu:

- a. Masyarakat orang tua siswa: orang tua memiliki anak yang sedang sekolah
- b. Masyarakat yang terorganisasi: kelompok organisasi bisnis, politik, sosial, keagamaan, dan sebagainya
- c. Masyarakat secara luas: pribadi-pribadi dan masyarakat secara umum.

Keterlibatan masyarakat dalam bidang pendidikan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat, yang berarti mengikut sertakan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan (Tim Pakar Manajemen Pendidikan UNM, 2003, p.122). Manajemen pendidikan

berbasis masyarakat secara konseptual, merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”.

Pendidikan dari masyarakat artinya pendidikan memberi jawaban atas kebutuhan masyarakat. Pendidikan oleh masyarakat artinya masyarakat ditempatkan sebagai subjek/pelaku pendidikan, bukan objek pendidikan. Pada konteks ini masyarakat dituntut peran dan partisipasi aktif dalam setiap program pendidikan. Adapun pengertian pendidikan untuk masyarakat artinya masyarakat diikutsertakan dalam semua program yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mereka. secara singkat dapat dikatakan, bahwa masyarakat perlu diberdayakan, diberi peluang dan kebebasan untuk mendesain, merencanakan, membiayai, mengelola dan menilai sendiri apa yang diperlukan secara spesifik didalam, untuk dan oleh masyarakat sendiri (Zubaidi, 2007, p.156).

Menurut Resbin L. Sihite dalam M. Rohman (2012, p.67), mengemukakan tujuh peran serta masyarakat dalam pendidikan, yaitu:

- a. Sebagai sumber pendidikan
- b. Sebagai pelaku pendidikan
- c. Pelaksana pendidikan
- d. Pengguna hasil pendidikan
- e. Perencanaan pendidikan
- f. Pengawasan pendidikan
- g. Evaluasi program pendidikan

Merujuk pendapat diatas, manajemen pendidikan berbasis masyarakat dapat diimplementasikan melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengembangan yang terus-menerus melalui budgeting dan evaluasi. Konteks berbasis masyarakat disini menunjuk pada derajat kepemilikan masyarakat. Masyarakat memiliki otoritas dalam mengambil keputusan dan menentukan tujuan pendidikan.

Masyarakat sebagai sumber artinya banyak hal yang dapat diambil dari masyarakat untuk kepentingan pendidikan. Meskipun masyarakat punah, tetapi peninggalan mereka dapat diambil baik ilmunya, kebudayaannya, dan sebagainya. Masyarakat sebagai pelaku pendidikan artinya baik perorangan atau kelompok bertindak selaku pembelajar. Masyarakat sebagai pelaksana pendidikan melakukan kegiatan penyelenggaraan dan

pembinaan pendidikan yang bertugas membuat peraturan perundang-undangan, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan pembinaan di bidang pendidikan.

Masyarakat sebagai pengguna hasil pendidikan yaitu bentuk lulusan yang akan menerapkan ilmu yang telah mereka peroleh di lembaga pendidikan dalam dunia kerja. Baik pemerintah, industri, perusahaan, dan lainnya sebagai pengguna pendidikan, akan merasakan akibat pendidikan jika tidak bermutu. Oleh karena itu harus ada kesesuaian antara program layanan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat melalui kerjasama.

Masyarakat sebagai perencana adalah dalam bentuk pemberian ide atau masukan pemikiran yang bermakna untuk mendukung bagi tersusunnya perencanaan yang baik. Peran aktif masyarakat diharapkan dalam penyampaian informasi atau terlibat langsung dalam penyampaian informasi atau terlibat langsung dalam diskusi penyusunan perencanaan, sehingga lulusan akan kebutuhan masyarakat dan lapangan kerja bersesuaian.

Masyarakat sebagai pengawas untuk pengendalian agar pelaksanaan program dapat terjamin sesuai dengan perencanaan. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh dewan pendidikan dan komite sekolah. Masyarakat sebagai evaluator, mengevaluasi program pendidikan untuk mengukur sejauh mana ketercapaian program dan manfaat program bagi pencapaian tujuan. Sebagai contoh pengukuran yaitu berapa banyak lulusan suatu sekolah diterima di perguruan tinggi atau dunia kerja.

Keterkaitan masyarakat dengan lembaga pendidikan

Dalam melaksanakan kerjasama dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dengan lembaga pendidikan sering muncul beberapa kendala seperti kurangnya jalinan komunikasi dan kemungkinan usaha masyarakat mengeksploitasi keberadaan lembaga pendidikan, kegiatan mengkritik dan menyerang yang bertujuan menjatuhkan kebijakan lembaga pendidikan. Misalnya suatu perusahaan bersedia menjadi donatur penyelenggaraan suatu lembaga pendidikan dengan syarat agar siswa mau menggunakan produk tertentu. Untuk mengatasi kendala tersebut maka pihak lembaga

pendidikan perlu tanggap dengan cara menganalisis motif dibalik pemberian dana tersebut. Pimpinan perlu meng-analisis dan memecahkan masalah secara bijaksana.

Berdasarkan Layanan Riset Pendidikan dan Asosiasi Nasional Kepala Pendidikan Dasar di Alexandria dalam Tim Pakar Manajemen (2003) merumuskan berbagai tekhnik untuk meningkatkan keterlibatan berbagai pihak dalam menyelenggarakan pendidikan, teknik-teknik tersebut yaitu:

- a. Layanan masyarakat.
Mempelajari kebutuhan masyarakat dan melihat apa yang bisa diperbuat lembaga pendidikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang akhirnya dapat melayani kebutuhan mereka
- b. Program pemanfaatan alumni sekolah
Para senior sekolah dapat dilibatkan dalam kegiatan sekolah, mislanya menjadi pembicara kegiatan seminar di sekolah, keberhasilannya dalam menemph karir dapat diinformasikan kepada siswa sebagai motivasi
- c. Masyarakat sebagai model
Masyarakat sebagai model yang di contoh siswa di sekolah, terutama masyarakat yang berhasil dalam kehidupannya
- d. Open house
Lembaga pendidikan secara terbuka bersedia untuk diobservasi oleh masyarakat. Masyarakat dapat melihat secara langsung proses dan sarana di lembaga pendidikan. Agar masyarakat mengetahui apa dan bagaimana penyelenggaraan pendi-dikan di lembaga tersebut.
- e. Pemberian kesempatan kepada masyarakat.
Masyarakat dapat dengan suka rela membantu kegiatan di lembaga pendidikan
- f. Pengiriman pembaca
Anggota staf di lembaga pen-didikan yang berminat diberi ke-sempatan untuk mempromosikan program dan prestasi lembaga pen-didikan ke masyarakat pengguna lulusan atau calon siswa
- g. Masyarakat sebagai sumber infor-masi
Pihak lembaga pendidikan mena-nyakan kepada masyarakat tentang isu-isu yang hangat dan di buat rekomendasinya untuk pengem-bangan lembaga
- h. Diskusi panel

Siswa, orang tua, staf, dan pekerja tang lain mengadakan pertemuan untuk menindaklanjuti kegiatan hu-bungan lembaga pendidikan dengan masyarakat agar semua usaha yang dilakukan dapat dirasakan manfaatnya

Untuk mengatasi kendala jalinan komunikasi, ada beberapa cara untuk melakukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat sekitar lembaga yaitu:

- a. Memberdayakan orang-orang kunci, yaitu orang-orang yang mampu mempengaruhi dan dianut oleh orang lain. Seperti: kiyai, sesepuh desa, pengusaha, kepala desa, katua RT/RW, dan pejabat lainnya. Orang kunci ini diidentifikasi, dihubungi, diajak diskusi dalam memecahkan maslah di sekolah, serta diikutkan dalam memikirkan program pengem-bangan sekolah. Tokoh kunci ini menjadi media antara sekolah dengan masyarakat.
- b. Warga sekolah bersifat terbuka terhadap sarana dan kritik ma-syarakat. Maka kritik yang diterima haruslah selektif, karena perlu diwaspadai kemungkinan kritik yang ingin menjatuhkan sekolah.
- c. Melakukan komunikasi dengan masyarakat secara terus menerus, agar harapan dan kebutuhan ma-syarakat dan sekolah dapat sejalan
- d. Pada saat yang tepat pihak sekolah malibatkan masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Misalnya kegiatan olah-raga, kesenian, dan sebagainya.

Prinsip-Prinsip Peningkatan Keterlibatan Masyarakat Dalam Mana-jemen Pendidikan

Prinsip ini menitikberatkan pada lembaga pendidikan yang mampu berkomunikasi secara aktif dengan masyarakat. Dan prinsip yang harus diterapkan, yaitu:

- a. Fleksibilitas. Lembaga pendidikan hendaknya mempunyai program yang cukup lentur dan beradaptasi secara terus menerus dengan perubahan-perubahan layanan lembaga lain di masyarakat. Perkembangan tuntutan masyarakat, pengetahuan, tekhnologi, yang begitu cepat perlu diikuti dengan program yang relevan.

- b. Relevansi. Peran dan fungsi lembaga pendidikan ditentukan sesuai dengan kondisi masyarakat yang menjadi latar belakang peserta didik. Karena anak setelah menyelesaikan studi akan kembali ke masyarakat sebagai pengguna lulusan suatu lembaga pendidikan.
- c. Partisipasi. Lembaga pendidikan bersama masyarakat hendaknya mengembangkan program kegiatan dan layanan guna memperluas, memperbaharui, memadukan pengalaman berbagai kelompok umur pada semua tingkatan. Lembaga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat ini.
- d. Komprehensi. Lembaga pendidikan harus menghubungkan dirinya dengan masyarakat yang lebih luas, intern bangsa maupun secara internasional.
- e. Melembaga. Layanan efektif dalam masyarakat pada setiap warga negara hanya dapat dicapai melalui organisasi, terutama organisasi pendidikan yang dikelola secara baik.

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Konsep Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau “school-based management” merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Menurut Edmond dalam Suryosubroto, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MBS) merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreatifitas sekolah. Konsep ini diperkenalkan oleh teori effective school yang lebih memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan (Suryosubroto, 2010, p.208).

MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dengan melibatkan masyarakat dalam kerangka kebijakan nasional. MBS merupakan wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para siswa. (Nurkholis, 2006, p.21)

Alasan penerapan MBS yaitu Pertama, sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan,

peluang dan ancaman bagi dirinya, sehingga sekolah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya. Kedua, sekolah lebih mengetahui kebutuhannya. Ketiga, keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat (Nurkholis, 2006, p.21).

Menurut Nanang Fatah tujuan penerapan MBS memberi leluasa pada pihak pengelola pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh sekolah masing-masing bahkan dalam mengambil keputusan pengelola pendidikan tidak harus menunggu dari pemerintah. Manajemen berbasis Sekolah mengubah sistem pengambilan keputusan dengan memindahkan otoritas dalam pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap yang berkepentingan di tingkat local (Fatah, 2006, p.23).

Dengan demikian sekolah memiliki kemandirian lebih besar dalam mengelola sekolahnya (menetapkan sasaran peningkatan mutu, menyusun rencana peningkatan mutu, melaksanakan rencana peningkatan mutu, dan melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu), memiliki fleksibilitas pengelolaan sumber daya sekolah, dan memiliki partisipasi yang lebih besar dari kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan Pendidikan Nasional ada beberapa alasan yang mendasari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, yaitu:

- a. Dengan pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah, maka sekolah akan lebih inisiatif/kreatif dalam meningkatkan mutu sekolah.
- b. Dengan pemberian fleksibilitas/keluasan-keluasan yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber dayanya, maka sekolah akan lebih luwes dan lincah dalam mengadakan dan memanfaatkan sumberdaya sekolah secara optimal untuk meningkatkan mutu sekolah.
- c. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya sehingga dia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya.
- d. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan

dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.

- e. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolahlah yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya.
- f. Penggunaan sumberdaya pendidikan lebih efisien dan efektif bilamana dikontrol oleh masyarakat setempat.
- g. Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat.
- h. Sekolah dapat bertanggungjawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang-tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan men-capai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan.
- i. Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orangtua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat.
- j. Sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat (<http://www.pdfsearch.com/MBS>).

Faktor-faktor pendukung keberhasilan implementasi MBS ialah:

- a. Adanya political will dari pengambil kebijakan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi sekolah
- b. Finansial atau keuangan yang memadai
- c. Sumber daya manusia yang tersedia
- d. Budaya sekolah
- e. Kepemimpinan
- f. Keorganisasian sekolah.

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

Untuk merealisasikan MBS diperlukan dukungan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas untuk membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat, serta mengefisienkan sistem dan menghilangkan birokrasi yang

tumpang tindih. MBS menuntut kesiapan pengelola pendidikan berbagai jenjang untuk melakukan perannya sesuai dengan kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawabnya.

MBS akan efektif diterapkan jika para pengelola pendidikan mampu melibatkan stakeholders terutama peningkatan peran serta masyarakat dalam menentukan kewenangan peng-administrasian, dan inovasi kurikulum yang dilakukan oleh masing-masing sekolah. Melalui komite/dewan sekolah (school council), orang tua dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembuatan berbagai keputusan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami, serta mengawasi dan membantu sekolah dalam pengelolaan termasuk kegiatan belajar-mengajar (Mulyasa, 2009, p.27).

Ciri-ciri implementasi MBS di sekolah dilihat dari berbagai aspek, yaitu:

- a. Aspek organisasi: sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan.
- b. Pembelajaran: meningkatkan kualitas belajar siswa, menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
- c. Sumber daya manusia: memberdayakan staf dan menempatkan personil yang dapat melayani keperluan siswa, menyediakan kegiatan untuk pengembangan profesi staf (Mulyasa, 2009, p.13).

Menurut Mulyasa strategi dalam pengimplementasian MBS, yakni:

- a. Perlu dilakukan pengelompokan sekolah berdasarkan kemampuan manajemen, dengan mempertimbangkan kondisi lokasi dan kualitas sekolah. Dalam hal ini sedikitnya akan ditemui tiga kategori sekolah, yaitu baik, sedang, dan kurang, yang tersebar di lokasi-lokasi maju, sedang, dan ketinggalan. Perbedaan kemampuan manajemen, mengharuskan perlakuan yang berbeda terhadap setiap sekolah sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing dalam menyerap paradigma baru yang ditawarkan MBS;
- b. Tahapan implementasi MBS melalui tiga tahap yaitu jangka pendek (tahun pertama sampai dengan tahun ketiga), jangka menengah (tahun keempat sampai dengan

tahun keenam), dan jangka panjang (setelah tahun keenam)

- c. Implementasi MBS memerlukan seperangkat peraturan dan pedoman-pedoman (guidelines) umum yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta laporan pelaksanaan. Perangkat implementasi ini perlu diperkenalkan sejak awal, melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan sejak pelaksanaan jangka pendek. (Mulyasa, 2009, p.13)

Beberapa hambatan dalam penerapan MBS (<http://diny24.wordpress.com>) adalah sebagai berikut:

- a. Tidak berminat untuk terlibat
Mereka tidak berminat untuk ikut serta dalam kegiatan yang menurut mereka hanya menambah beban. Anggota dewan sekolah harus lebih banyak menggunakan waktunya dalam hal-hal yang menyangkut perencanaan dan anggaran. Akibatnya kepala sekolah dan guru tidak memiliki banyak waktu yang tersisa untuk memikirkan aspek-aspek lain dari pekerjaan mereka.
- b. Tidak efisien
Pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif adakalanya menimbulkan frustrasi dan seringkali lebih lambat dibandingkan dengan cara-cara yang otokratis. Para anggota dewan sekolah harus dapat bekerja sama dan memusatkan perhatian pada tugas, bukan pada hal lain di luar itu.
- c. Pikiran kelompok
Setelah beberapa saat bersama, para anggota dewan sekolah kemungkinan besar akan semakin kohesif. Di satu sisi hal ini berdampak positif karena mereka akan saling mendukung satu sama lain. Di sisi lain, kohesivitas itu menyebabkan anggota terlalu kompromis hanya karena tidak merasa enak berlainan pendapat dengan anggota lainnya. Pada saat inilah dewan sekolah mulai terjangkit "pikiran kelompok." Ini berbahaya karena keputusan yang diambil kemungkinan besar tidak lagi realistis.
- d. Memerlukan pelatihan
Pihak-pihak yang berkepentingan kemungkinan besar sama sekali tidak atau belum berpengalaman menerapkan model

yang rumit dan partisipatif ini. Mereka kemungkinan besar tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang hakikat MBS sebenarnya dan bagaimana cara kerjanya, pengambilan keputusan, komunikasi, dan sebagainya.

- e. Kebingungan atas peran dan tanggung jawab baru
Pihak-pihak yang terlibat kemungkinan besar telah sangat terbiasa dengan iklim kerja yang selama ini mereka geluti. Penerapan MBS mengubah peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang berkepentingan. Perubahan yang mendadak akan menimbulkan kejutan dan kebingungan sehingga mereka ragu untuk memikul tanggung jawab pengambilan keputusan.
- f. Kesulitan koordinasi
Setiap penerapan model yang rumit dan mencakup kegiatan yang beragam mengharuskan adanya koordinasi yang efektif dan efisien. Tanpa itu, kegiatan yang beragam akan berjalan sendiri ke tujuannya masing-masing yang kemungkinan besar sama sekali menjauh dari tujuan sekolah.
- g. Kurangnya pendidikan dan pelatihan tentang MBS, Sumber Daya Manusia yang kurang maksimal, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Beberapa faktor keberhasilan MBS diantaranya adalah:

- a. Adanya pemerataan pendidikan (berupa kesamaan kesempatan antara siswa desa-kota, kaya miskin, laki-perempuan, cacat-tidak cacat).
- b. Kualitas pendidikan (input, proses, output).
- c. Efektivitas dan efisiensi pendidikan (angka kenaikan kelas, angka kelulusan, angka putus sekolah).
- d. Tata pengelolaan sekolah yang baik (melalui partisipasi, transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas, wawasan ke depan, penegakan hukum, keadilan, demokratisasi, prediktif, kepekaan, profesionalisme, efektivitas dan efisiensi, serta kepastian jaminan hukum (Depdiknas, 2007, p.59).

Pihak sekolah berupaya mengoptimalkan informasi, kebijakan meningkatkan sumber daya manusia, pengambilan keputusan diadakan

musya-warah dan menampung aspirasi warga sekolah tentang perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Pengalaman penerapannya di tempat lain menunjukkan bahwa daerah yang paling berhasil menerapkan MBS telah memfokuskan harapan mereka pada dua masalah: meningkatkan keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan menghasilkan keputusan lebih baik.

PENUTUP

Keterlibatan masyarakat dalam manajemen lembaga pendidikan Islam merupakan upaya pemberdayaan masyarakat, yang berarti mengikut sertakan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Masyarakat perlu membantu penyelenggaraan pendidikan agar permasalahan dilapangan dapat diatasi dan pelaksanaan proses berjalan lancar sehingga kualitas pendidikan dapat meningkat. Pengelola pendidikan perlu melibatkan semua unsur yang ada di sekolah dan masyarakat termasuk perusahaan, lembaga agama, dan lainnya. Masyarakat memiliki otoritas dalam mengambil keputusan dan menentukan tujuan lembaga pendidikan Islam melalui kerja sama yang baik.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada hakikatnya adalah penyerasian sumberdaya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Tujuan penerapan manajemen berbasis sekolah pada lembaga pendidikan Islam secara umum adalah untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada sekolah, pemberian fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumberdaya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Herry Hermawan, dkk. Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran, cet.9. Jakarta: Univ.terbuka. 2008.
- Depdiknas. Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah. 2007.
- Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung. Manajemen Syariah dalam Praktik. Jakarta: Gema Insani. 2003.
- E. Mulyasa. Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- _____. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: Rosda Karya. 2009.
- _____. Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002.
- Hikmat. Manajemen Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Imron Fauzi. Manajemen Pendidikan Ala Rasulullah. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- James H. Lytle. Working for Kids "Educational Leadership as Inquiry and Invention", (United Kingdom: Rowman & Littlefield Education. 2010.
- M. Rohman dan Sofan Amri. Manajemen Pendidikan: Analisis Dan Solusi Terhadap Kinerja Manajemen Kelas Dan Strategi Pengajaran Yang Efektif. Jakarta: Prestasi Pustakaraya. 2012.
- Mukhtar dan Iskandar. Orientasi Baru Supervisi Pendidikan. Jakarta: Gaung Persada Press. 2009.
- Nanang Fatah. Konsep Manajemen berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2006.
- Nurkolis. Manajemen Berbasis Sekolah Teori, Model dan Aplikasi. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2006.
- Project Management Institute. A Guide to The Project Management Body of Knowledge. USA: ANSI. 2008.
- Ramayulis. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia. 2010.

Sadili Samsudin. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.

Suryosubroto. *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

Tim Pakar Manajemen Pendidikan UNM. *Manajemen Pendidikan: Analisis Substantif Dan Aplikasinya Dalam Institusi Pendidikan*. Malang: UNM. 2003.

Wahjosumidjo. *Kepemimpinan Kepala Sekolah (Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.

Veithzal Rivai Zainal dkk. *Islamic Management “Meraih sukses melalui Praktis Manajemen Gaya Rasulullah secara Istiqomah*. Yogyakarta: BPFE. 2013.

Zubaedi. *Pendidikan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.

<http://www.pdfsearch.com/MBS>

<http://diny24.wordpress.com>